

Dari Kejayaan ke Keterbengkalaian: Analisis Kegagalan Tata Kelola Kolaboratif dan Strategi Revitalisasi Destinasi Wisata Telaga Gupit, Gadingrejo, Pringsewu, Lampung

Melvin Badriansyah^{1*}, Andika Gilang Nurmoyo², Mohammad Gozali³

^{1 2}Program Studi Magister Pariwisata Berkelanjutan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

E-mail: melvin19001@mail.unpad.ac.id*, andika25001@mail.unpad.ac.id,
mohamad25020@mail.unpad.ac.id

Received: 24 Juni 2026 | Revised: 25 Juni 2026 | Accepted: 26 Juni 2026

Abstrak

Telaga Gupit di Pekon Mataram dan Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, sempat menjadi destinasi wisata air unggulan sejak diresmikan pada Desember 2017, namun mengalami kemunduran drastis pascapandemi COVID-19 hingga dilaporkan terbengkalai pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis akar kegagalan tata kelola kolaboratif yang menyebabkan keterbengkalaian tersebut serta merumuskan strategi revitalisasinya. Penelitian menggunakan metode studi kasus kualitatif berbasis analisis dokumen dan media (media/document content analysis), dengan sumber data berupa pemberitaan media daring tahun 2018–2025, dokumen pemerintah desa, dan penelitian akademik terdahulu. Analisis dilakukan menggunakan kerangka *collaborative governance* untuk mendiagnosis kegagalan kelembagaan, dan kerangka Tourism Area Life Cycle (TALC) untuk memosisikan destinasi dalam siklus hidupnya. Hasil penelitian menunjukkan tiga simptom utama kegagalan kolaborasi: fragmentasi kewenangan antar-level pemerintahan tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, vakum kepemimpinan pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di dua pekon, dan hilangnya memori institusional akibat pergantian pejabat dinas. Faktor eksogen seperti pandemi COVID-19 dan karakter hidrologis telaga yang bergantung pada air tadah hujan memperparah kerentanan tersebut. Telaga Gupit diposisikan berada pada fase *decline* (penurunan) dalam siklus hidup destinasi wisata, dengan opsi *rejuvenation* (peremajaan) yang masih terbuka apabila intervensi kelembagaan dan ekologis dilakukan segera. Penelitian merekomendasikan penguatan kejelasan delegasi kewenangan, reaktivasi Pokdarwis dengan pendampingan berkelanjutan, pengendalian gulma air, dan pembentukan mekanisme pemantauan aset pascahibah.

Kata kunci: collaborative governance; destinasi wisata terbengkalai; Pokdarwis; revitalisasi destinasi; Telaga Gupit

Abstract

Telaga Gupit, located in Mataram and Tegalsari villages, Gadingrejo District, Pringsewu Regency, Lampung, was once a leading water-based tourist attraction following its inauguration in December 2017, but experienced a sharp decline after the COVID-19 pandemic and was reported abandoned by 2025. This study aims to analyze the root causes of collaborative governance failure underlying this abandonment and to formulate revitalization strategies. The study employs a qualitative case study method based on media and document content analysis, drawing on online news coverage from 2018–2025, village government documents, and prior academic research. The analysis applies a collaborative governance framework to diagnose institutional failure and the Tourism Area Life Cycle (TALC) framework to position the destination within its life cycle. The findings reveal three main symptoms of collaborative failure: fragmented authority across government levels without clear accountability mechanisms, a leadership vacuum within the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) across two villages, and the erosion of institutional memory due to frequent turnover of agency officials. Exogenous factors such as the COVID-19 pandemic and the lake's rain-fed hydrological character exacerbated this vulnerability. Telaga Gupit is positioned at the decline stage of the destination life cycle, with a rejuvenation pathway still feasible if institutional and ecological interventions are undertaken promptly. The study recommends clarifying authority delegation, reactivating Pokdarwis with sustained mentorship, controlling aquatic weed growth, and establishing a post-grant asset monitoring mechanism.

Keywords: abandoned tourist destination; collaborative governance; destination revitalization; Pokdarwis; Telaga Gupit

Pendahuluan

Pembangunan destinasi wisata berbasis sumber daya alam oleh pemerintah daerah di Indonesia kerap menghadapi tantangan keberlanjutan pascapeluncuran. Salah satu kasus yang merepresentasikan fenomena tersebut adalah Telaga Gupit, destinasi wisata air di Pekon Mataram dan Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Telaga Gupit diresmikan pada 10 Desember 2017 oleh Bupati Pringsewu saat itu, dengan pengelolaan diserahkan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang

dibentuk di tingkat pekon. Pada 2018, destinasi ini telah memiliki dua unit speed boat, perahu karet, fasilitas bermain, dan kolam renang anak, serta menggerakkan ekonomi sekitar dua puluh warung kuliner milik warga setempat. Namun sejak tahun-tahun awal operasinya, Telaga Gupit menghadapi tantangan struktural berupa karakter hidrologisnya yang bergantung pada air tadah hujan. Pada Juli 2019, debit air telaga tercatat terus menyusut pada musim kemarau, berdampak pada turunnya jumlah pengunjung. Pengelola saat itu mengungkapkan bahwa nama resmi infrastruktur ini adalah Bendung Way Pujorahayu, yang fungsi utamanya adalah irigasi pertanian, dan baru dikenal publik sebagai destinasi wisata setelah peresmian 2017.



Gambar 1. Telaga Gupit pada kondisi berair penuh, sebelum periode keterbengkaian
Sumber: @urbanstylelampung. (2022). Instagram. Foto disediakan oleh kontributor data penelitian.

Krisis Telaga Gupit semakin nyata pascapandemi COVID-19; Kepala Pekon Mataram mengonfirmasi destinasi tersebut tutup sejak masa pandemi dan tidak beroperasi normal kembali. Pemberitaan 2023 mencatat permukaan telaga dipenuhi eceng gondok yang mengganggu ekosistem, sementara anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang turut menggagas pendirian destinasi ini menyayangkan pengelolaan Pokdarwis di dua pekon yang tidak lagi berjalan efektif. Pada November 2024, kekeringan panjang kembali melanda dan menimbulkan kekhawatiran warga atas kelangsungan fungsi wisata maupun irigasi.

Titik nadir kemunduran ini terekam dalam laporan investigatif media pada November 2025, yang mendokumentasikan kerusakan parah pada bangunan shelter dan fasilitas bermain, termasuk pencurian instalasi listrik. Yang paling mencolok

bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan respons dua pejabat yang seharusnya bertanggung jawab: Kepala Pekon Mataram menyatakan tidak mengetahui banyak hal mengenai keberadaan Telaga Gupit di wilayahnya, sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menyatakan tidak mengetahui detail aset tersebut karena baru menjabat sejak 2023. Fenomena “saling tidak tahu” antara pejabat di dua level pemerintahan berbeda ini menjadi simtom yang menarik untuk dikaji: bukan sekadar kegagalan teknis pemeliharaan, melainkan indikasi kegagalan tata kelola kolaboratif yang lebih mendasar.

Kompleksitas kelembagaan Telaga Gupit tercermin dari jumlah pihak yang terlibat: destinasi ini dibangun oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2020 dan dikelola bersama oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, sementara kewenangan harian dihibahkan kepada Pokdarwis di tingkat pekan. Struktur ini melibatkan setidaknya empat lapis aktor—dua dinas provinsi, kabupaten, pekan, dan kelompok masyarakat—tanpa mekanisme akuntabilitas bersama yang terdokumentasi secara publik.

Pola kegagalan kapasitas kelembagaan Pokdarwis seperti ini bukan kasus terisolasi. Penelitian pada desa wisata Ketenger, Banyumas menemukan bahwa kapasitas Pokdarwis dalam aspek kepemimpinan dan koordinasi sering menjadi titik lemah meskipun aspek lain (kemitraan eksternal, pengembangan produk) berjalan cukup baik (Prafitri & Damayanti, 2016). Temuan serupa muncul pada studi kasus Pokdarwis Desa Kaleke, Sigi, di mana dari 21 pengurus yang dibentuk, hanya ketua yang secara aktif menjalankan tugas, sehingga pengembangan desa wisata tetap terfragmentasi dan bersifat individual (Saputra & Kamindang, 2024). Junaid (2023) menambahkan bahwa konflik internal kelembagaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan ketidakjelasan legalitas kelembagaan adalah tantangan struktural yang berulang dihadapi Pokdarwis di berbagai desa wisata Indonesia.

Penelitian akademik mengenai destinasi sebanding di Indonesia menunjukkan pola berulang yang relevan dengan kasus Telaga Gupit. Wibowo dkk. (2022) dalam investigasi empiris tata kelola kolaboratif Desa Wisata Ngargoretno, Magelang, menemukan bahwa kejelasan visi-misi bersama dan tata kelola kolaboratif antarpemangku kepentingan menjadi penentu utama kemandirian dan keberlanjutan desa

wisata. Sementara itu, Muhamad dkk. (2026) pada kasus transformasi Air Terjun Sempor menegaskan bahwa kondisi biofisik—khususnya hidrologi dan ketergantungan musiman—merupakan faktor fundamental yang menentukan kelayakan dan keberlanjutan destinasi wisata berbasis sumber daya air, sejalan dengan karakter Telaga Gupit yang sepenuhnya bergantung pada air tadah hujan. Sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian akademik yang secara eksplisit menyentuh dimensi kegagalan tata kelola kolaboratif antar-level pemerintahan pada kasus Telaga Gupit pascaeskalasi keterbengkalaian 2023–2025—celah yang diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis akar kegagalan tata kelola kolaboratif yang menyebabkan keterbengkalaian Telaga Gupit, dan (2) merumuskan strategi revitalisasi yang relevan dengan posisi destinasi ini dalam siklus hidupnya, mengikuti pola revitalisasi destinasi pascapandemi yang juga diamati pada kasus lain seperti Monumen Nasional Jakarta (Nugraha & Putra, 2023).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif-analitis, untuk eksplorasi mendalam terhadap keterbengkalaian destinasi wisata dalam konteks nyatanya. Pengumpulan dan analisis data dilaksanakan pada tahun 2026, dengan data sekunder yang dirujuk mencakup periode peristiwa 2017–2025; dengan demikian, tahun 2026 yang tercantum pada gambar dan tabel mengacu pada tahun analisis/penyusunan penelitian, bukan tahun peristiwa yang dianalisis.

Objek dan Sumber Data

Objek penelitian adalah Telaga Gupit di Pekon Mataram dan Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan analisis konten media (media/document content analysis), dengan tiga kategori sumber: (1) sembilan pemberitaan media daring 2018–2025 sebagai data faktual-kronologis, yang dinarasikan dalam teks tanpa sitasi formal karena bukan termasuk kategori acuan primer; (2) penelitian akademik terdahulu mengenai destinasi Pokdarwis/desa wisata sebanding di Indonesia, sebagai dasar teoretis dan komparatif yang dirujuk dalam Daftar Pustaka; dan (3) dokumen pemerintah desa.

Kriteria Seleksi dan Validitas Data Sekunder

Mengingat penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada analisis dokumen dan media, pemilihan kesembilan pemberitaan dilakukan melalui tiga kriteria seleksi. Pertama, kredibilitas media: seluruh sumber adalah portal berita teregistrasi yang berafiliasi dengan jaringan media nasional (seperti grup iNews dan RMOL) atau media massa daerah Lampung yang memiliki rekam jejak liputan reguler atas isu pariwisata dan pemerintahan lokal, sehingga dapat dibedakan dari blog pribadi atau forum tanpa standar redaksional. Kedua, relevansi tematik: hanya pemberitaan yang secara langsung melaporkan kondisi fisik, status pengelolaan, atau pernyataan resmi pemangku kepentingan (Pokdarwis, perangkat pekon, dinas terkait, DPRD) mengenai Telaga Gupit yang dimasukkan, sehingga laporan yang sifatnya promosi wisata umum tanpa data substantif dikeluarkan. Ketiga, cakupan temporal: pemberitaan dipilih untuk merepresentasikan setiap fase penting dalam lintasan historis destinasi (peresmian, masa puncak, krisis musiman, dan eskalasi kerusakan pascapandemi), bukan dipilih secara acak, sehingga kesembilan sumber tersebut secara kolektif mencakup rentang 2017–2025 tanpa jeda informasi yang signifikan. Validitas data lebih lanjut diperkuat melalui triangulasi dengan dokumen pemerintah desa dan dibandingkan dengan pola yang ditemukan pada penelitian akademik atas kasus Pokdarwis/desa wisata sebanding, sebagaimana diuraikan pada subbagian berikut.

Triangulasi dan Kerangka Analisis

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari ketiga kategori sumber untuk memastikan konsistensi fakta kunci. Analisis menggunakan dua kerangka teoretis yang saling melengkapi: *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif) (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012) untuk mendiagnosis kegagalan kelembagaan, dengan penekanan pada kejelasan desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan riwayat hubungan antar-aktor; dan Tourism Area Life Cycle/TALC (Butler, 1980) untuk memosisikan Telaga Gupit dalam siklus hidup evolusi destinasi—eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, hingga penurunan (*decline*) atau peremajaan (*rejuvenation*).

Teknik Analisis dan Keterbatasan

Analisis data dilakukan secara tematik: mengorganisasikan data secara kronologis, mengidentifikasi tema kendala kelembagaan dan ekologis, memetakannya ke dimensi *collaborative governance*, dan memosisikan kondisi destinasi pada tahapan TALC. Keterbatasan utama penelitian ini adalah ketiadaan

observasi lapangan langsung maupun wawancara primer dengan Pokdarwis, perangkat pekon, atau dinas terkait, sehingga akurasi temuan bergantung pada akurasi pemberitaan media yang dirujuk. Penelitian ini juga tidak menyertakan data kuantitatif kunjungan wisatawan karena tidak dipublikasikan resmi oleh instansi terkait.

Hasil dan Pembahasan

Lintasan Historis: Dari Peresmian ke Keterbengkalaian

Rekonstruksi kronologis menunjukkan Telaga Gupit mengalami siklus naik-turun signifikan dalam kurun waktu kurang dari satu dekade (Tabel 1).

Tabel 1. Lintasan Historis Telaga Gupit (2017–2025)

Periode	Peristiwa
10 Des 2017	Peresmian Taman Wisata Telaga Gupit oleh Bupati Pringsewu; pembentukan Pokdarwis pekon
2018	Fase pertumbuhan: speed boat, perahu karet, kolam renang anak, 20 warung kuliner warga
23 Jul 2019	Krisis kekeringan musiman pertama terdokumentasi; usulan sumur bor belum direalisasi
1 Nov 2020	Air surut dimanfaatkan sebagai agenda “panen ikan” tahunan, dihadiri Wakil Bupati
TA 2020	Pembangunan oleh Dinas Pariwisata & Ekraf Provinsi; pengelolaan bersama Dinas PKPSDA Provinsi
2020–2021	Operasional tutup akibat pandemi COVID-19
23 Mar 2023	Permukaan telaga dipenuhi eceng gondok, mengganggu ekosistem
6 Okt 2023	DPRD Pringsewu menyoroti kepengurusan Pokdarwis dua pekon yang tidak berjalan
13 Jun 2024	Ketua Pokdarwis menyatakan kebutuhan investasi pemulihan; luas 13 ha, kedalaman 7 m
20 Nov 2024	Kekeringan panjang berulang; kekhawatiran warga atas ekosistem dan ekonomi lokal
3 Nov 2025	Kerusakan parah terdokumentasi; Kades dan Kadisparekraf Provinsi tidak mengetahui detail aset

Sumber: kompilasi penulis dari sembilan pemberitaan media periode 2018–2025 dan penelitian akademik terdahulu, disusun tahun 2026

Lintasan tersebut konsisten dengan kurva-S evolusi destinasi wisata (Butler, 1980): fase pertumbuhan cepat pascapeluncuran (2017–2018), tanda-tanda kerentanan

struktural yang muncul sejak tahun ketiga (2019), disrupted oleh kejadian eksogen (pandemi), dan kemunduran yang berlanjut hingga 2025 tanpa intervensi pemulihan berarti.



Gambar 2. Kondisi air Telaga Gupit yang mulai surut pada musim kemarau
Sumber: Saeful. (2019, 23 Juli). Lampung Raya News.

Menariknya, surutnya air pada musim kemarau sempat dimanfaatkan secara kreatif oleh Pokdarwis dan pemerintah kabupaten sebagai agenda wisata “panen ikan” tahunan, menunjukkan adanya kapasitas adaptif pada periode awal—kapasitas yang nampak menghilang pada periode-periode setelahnya.

Anatomi Kegagalan Kolaborasi

Analisis tematik terhadap data yang tersedia mengidentifikasi tiga simptom utama kegagalan tata kelola kolaboratif pascapandemi.

Fragmentasi Kewenangan Antar-Level Pemerintahan

Struktur kewenangan Telaga Gupit melibatkan setidaknya empat lapis aktor: dua dinas provinsi, pemerintah Kabupaten Pringsewu, pemerintah dua pekon, serta

Pokdarwis masing-masing pekon. Dalam kerangka *collaborative governance*, keberhasilan kolaborasi multi-aktor bergantung pada kejelasan desain kelembagaan—termasuk aturan partisipasi dan batasan tanggung jawab yang disepakati bersama (Ansell & Gash, 2008). Fragmentasi semacam ini bukan kekhususan Telaga Gupit; Saputra dkk. (2022) dalam kajian pengembangan wisata dan ekonomi kreatif Lampung menemukan bahwa koordinasi lintas-sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pelaku wisata di tingkat tapak masih menjadi tantangan utama penerapan *collaborative governance* di sektor pariwisata Lampung secara umum. Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi pada 2025 bahwa dirinya tidak mengetahui detail aset karena baru menjabat sejak 2023, dan bahwa seluruh hibah pengelolaan telah diserahkan kepada Pokdarwis, mengindikasikan tidak adanya mekanisme pencatatan aset yang terdokumentasi secara institusional.

Pernyataan senada muncul dari Kepala Pekon Mataram, yang tidak mengetahui banyak hal mengenai keberadaan Telaga Gupit di wilayahnya. Baik level provinsi maupun pekon merasa tanggung jawab pengelolaan berada di pihak lain—kekosongan akuntabilitas yang menggambarkan kegagalan dalam *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif), yaitu ketidakhadiran aktor yang aktif menjembatani kepentingan antar-level (Emerson et al., 2012). Sebaliknya, kasus Ngargoretno menunjukkan bahwa kejelasan visi-misi bersama dan komitmen kolaboratif yang terbangun sejak awal dapat menjadi fondasi kemandirian desa wisata (Wibowo dkk., 2022)—fondasi yang tampak absen pada Telaga Gupit.

Vakum Kepemimpinan Pokdarwis

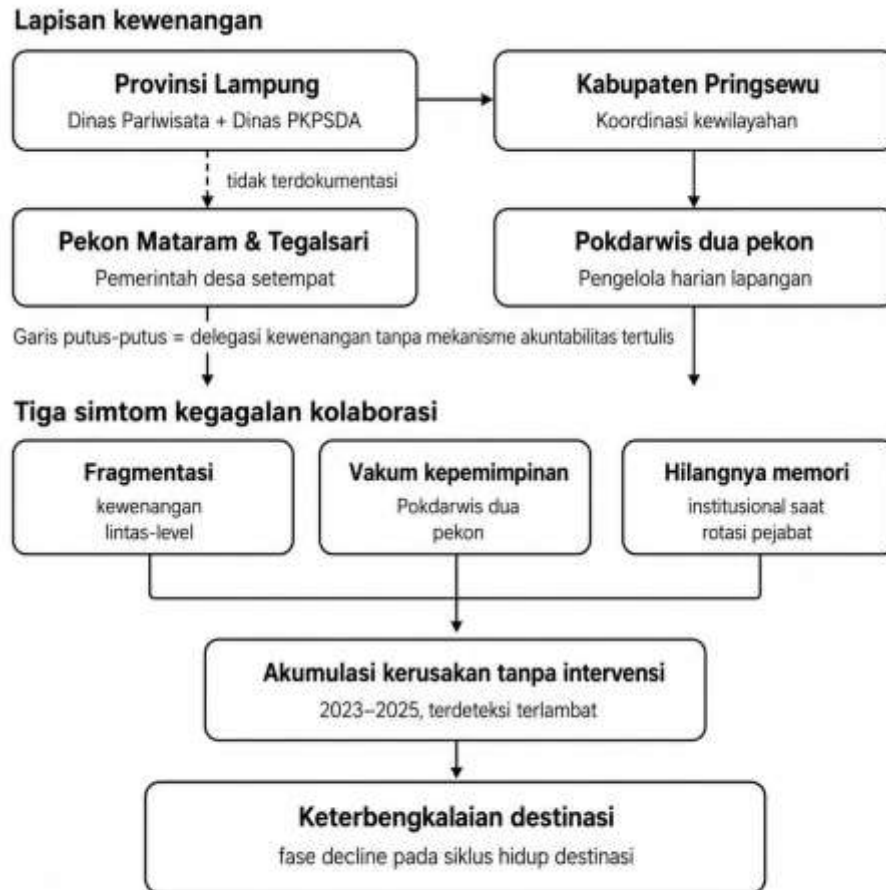
Simtom kedua adalah lemahnya kepengurusan Pokdarwis. Pada Oktober 2023, anggota DPRD yang turut menggagas destinasi ini menyayangkan kepengurusan Pokdarwis di dua pekon yang tidak berjalan, meski sarana fisik (panggung kesenian, perahu, keramba) masih tersedia. Pada 2024, Ketua Pokdarwis menyatakan kebutuhan investasi pemulihan, menunjukkan kesadaran masalah tanpa kapasitas kelembagaan dan finansial untuk mengatasinya secara mandiri.

Pola ini konsisten dengan dua studi kasus Pokdarwis lain di Indonesia. Pada Desa Wisata Ketenger, kapasitas organisasi dalam aspek kepemimpinan dan koordinasi

tergolong kurang memadai meski aspek kemitraan eksternal sudah berjalan baik (Prafitri & Damayanti, 2016). Pada Pokdarwis Desa Kaleke, dari 21 pengurus yang ditetapkan, hanya ketua yang aktif menjalankan tugas dan berkoordinasi dengan kepala desa, sehingga pengembangan produk wisata dan promosi destinasi belum terlaksana secara efektif (Saputra & Kamindang, 2024). Junaid (2023) menyimpulkan bahwa tanpa tokoh pemimpin yang menerapkan kepemimpinan efektif dan penguatan sinergi antar-stakeholder, kelembagaan Pokdarwis di berbagai desa wisata cenderung berjalan di tempat—pola yang juga tercermin pada kasus Telaga Gupit.

Hilangnya Memori Institusional

Simtom ketiga adalah hilangnya memori institusional akibat pergantian pejabat tanpa mekanisme transfer pengetahuan. Pengakuan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi yang baru menjabat sejak 2023 dan tidak mengetahui detail aset yang dihibahkan jauh sebelum masa jabatannya menggambarkan absennya dokumentasi serah-terima aset antar-periode kepemimpinan dinas. Tanpa sistem pencatatan independen dari individu yang menjabat, setiap pergantian pejabat berisiko menciptakan jeda pengawasan yang memungkinkan kerusakan aset berlangsung tanpa terdeteksi—sebagaimana tergambar dari rentang antara laporan kerusakan awal (2023) hingga laporan kerusakan parah (2025). Dikaitkan secara lebih eksplisit dengan kerangka *collaborative governance*, simtom ini menunjukkan kegagalan pada dimensi proses kolaboratif yang oleh Emerson dkk. (2012) disebut sebagai *institutional memory* atau kapasitas kelembagaan untuk menyimpan dan mewariskan pengetahuan kolektif antar-siklus kepemimpinan. Tanpa kapasitas tersebut, komitmen dan pemahaman bersama yang berhasil dibangun pada satu periode kepemimpinan tidak dapat diwariskan kepada periode berikutnya, sehingga setiap pergantian pejabat berpotensi mereset proses kolaborasi dari titik nol—bukan melanjutkan akumulasi kepercayaan dan pembelajaran bersama yang menjadi inti dari tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan. Gambaran lengkap terkait Anatomi kegagalan tata kelola kolaboratif pada Telaga Gupit disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Anatomi kegagalan tata kelola kolaboratif pada Telaga Gupit

Sumber: hasil analisis tematik penulis berdasarkan triangulasi data sekunder periode 2017–2025, disusun tahun 2026

Faktor Eksogen yang Memperparah Kerentanan

Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang konsisten disebutkan sebagai awal mula penutupan operasional, memutus siklus pendapatan yang sebelumnya menjadi insentif partisipasi bagi Pokdarwis dan pedagang lokal—sebuah disrupsi terhadap insentif berpartisipasi yang menjadi variabel penting keberlangsungan kolaborasi (Emerson et al., 2012).

Karakter hidrologis tadah hujan menjadi kerentanan struktural yang melekat sejak awal, sejalan dengan temuan bahwa kondisi biofisik dan ketersediaan air menjadi faktor fundamental penentu kelayakan destinasi wisata air (Muhamad dkk., 2026). Kerentanan ini terus berulang, terlihat dari laporan kekeringan panjang November

2024 yang hampir identik dengan laporan Juli 2019—menunjukkan bahwa lima tahun setelah masalah pertama diidentifikasi publik, belum ada intervensi infrastruktur (seperti sumur bor yang diusulkan sejak 2019) yang terealisasi.



Gambar 4. Kondisi dasar telaga yang mengering dengan struktur bendung/pintu air
Sumber: iNews Pringsewu. (2024, 20 November).

Invasi eceng gondok sejak 2023 berfungsi sebagai indikator visual paling jelas dari neglect pengelolaan, karena pertumbuhannya yang tak terkendali umumnya terjadi tanpa aktivitas pembersihan rutin. Tanaman ini memperburuk ekosistem perairan dan mempercepat pendangkalan, menciptakan lingkaran setan: semakin lama dibiarkan, semakin besar ambang investasi pemulihan yang dibutuhkan.



Gambar 5. Fasilitas gazebo/shelter yang terbengkalai di area Telaga Gupit
Sumber: Sundalanews.com. (2023, 6 Oktober).

Positioning dalam Siklus Hidup Destinasi (TALC)

Berdasarkan temuan di atas, Telaga Gupit dapat diposisikan dalam kerangka TALC (Butler, 1980): fase eksplorasi dan keterlibatan (2017), pengembangan dengan pertumbuhan fasilitas pesat (2018), stagnasi dengan kerentanan struktural yang mulai termanifestasi (2019–2020), dan penurunan (*decline*) pascapandemi hingga kini (2021–2025). Pola pergeseran siklus yang tidak linear seperti ini sejalan dengan temuan Damanik dkk. (2018) bahwa perkembangan destinasi pariwisata di berbagai daerah Indonesia jarang mengikuti asumsi TALC secara murni, melainkan dipengaruhi faktor eksternal dan karakteristik lokal yang spesifik.

Butler (1980) menekankan bahwa pada titik tertentu, destinasi menghadapi titik cabang antara peremajaan (*rejuvenation*) melalui investasi dan inovasi kelembagaan, atau penurunan lanjutan hingga ditinggalkan sepenuhnya. Ketidadaan intervensi struktural signifikan antara 2019 dan 2025 menunjukkan Telaga Gupit condong ke arah penurunan lanjutan, meski jalur peremajaan secara teoretis masih terbuka apabila ketiga simptom kegagalan kolaborasi ditangani simultan—sebagaimana ditunjukkan kasus revitalisasi Monumen Nasional yang berhasil membalik tren penurunan kunjungan pascapandemi melalui intervensi fisik dan kelembagaan terkoordinasi (Nugraha & Putra, 2023). Revitalisasi Telaga Gupit pada dasarnya adalah persoalan membangun ulang kolaborasi yang pernah ada namun terputus, bukan sekadar investasi fisik semata.

Strategi Revitalisasi

Berdasarkan diagnosis di atas, penelitian ini merumuskan strategi revitalisasi dalam empat dimensi yang saling berkaitan (Tabel 2).

Tabel 2. Strategi Revitalisasi Telaga Gupit Berdasarkan Empat Dimensi

Dimensi	Permasalahan	Strategi Revitalisasi
Kelembagaan	Fragmentasi kewenangan provinsi-kabupaten-pekong-Pokdarwis tanpa akuntabilitas terdokumentasi	MoU tertulis lintas-level: pembagian tanggung jawab, pelaporan berkala, protokol transfer pengetahuan

Dimensi	Permasalahan	Strategi Revitalisasi
Ekologis	Invasi eceng gondok; ketergantungan air tadah hujan	Pengendalian gulma air rutin; eksplorasi sumur bor (diusulkan sejak 2019)
Sosial-ekonomi	Vakum kepemimpinan Pokdarwis; ketergantungan ekonomi pada musim	Reaktivasi Pokdarwis dgn pendampingan berkelanjutan; diversifikasi atraksi (“panen ikan”)
Kebijakan	Hilangnya memori institusional akibat rotasi pejabat	Basis data aset wisata daerah terintegrasi, lintas periode kepemimpinan

Sumber: hasil analisis penulis berdasarkan temuan periode 2017–2025, disusun tahun 2026

Dimensi kelembagaan menjadi prioritas utama karena seluruh simptom kegagalan berakar dari ketidakjelasan struktur akuntabilitas. MoU tertulis dan terdokumentasi antara provinsi, kabupaten, dan Pokdarwis dapat mencegah berulangunya pola “saling tidak tahu” yang ditemukan dalam penelitian ini.

Dimensi ekologis memerlukan pengendalian rutin eceng gondok dan eksplorasi solusi sumber air tambahan, termasuk opsi sumur bor yang diusulkan sejak 2019 namun belum terealisasi.

Dimensi sosial-ekonomi memerlukan reaktivasi Pokdarwis melalui pendampingan berkelanjutan—bukan sekadar pembentukan struktur formal, mengingat pola serupa di Desa Kaleke menunjukkan struktur formal tanpa pendampingan berkelanjutan gagal menghasilkan partisipasi aktif anggota (Saputra & Kamindang, 2024). Diversifikasi atraksi seperti penguatan agenda “panen ikan” dapat menjadi strategi adaptif terhadap karakter musiman telaga.

Dimensi kebijakan memerlukan basis data aset wisata daerah yang terintegrasi dan dapat diakses lintas periode kepemimpinan, sehingga status aset tidak lagi bergantung pada memori personal individu yang menjabat.

Secara keseluruhan, analisis pada bagian ini menegaskan kembali kebaruan penelitian yang telah disampaikan pada bagian Pendahuluan. Berbeda dari kajian terdahulu mengenai Telaga Gupit yang berhenti pada level identifikasi kendala teknis dan ekologis, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa pemaduan dua kerangka teoretis—*collaborative governance* dan *Tourism Area Life Cycle*—untuk

mendiagnosis secara eksplisit bagaimana kegagalan proses kolaboratif antar-level pemerintahan, bukan sekadar keterbatasan sumber daya alam atau finansial, menjadi mekanisme utama di balik keterbengkalaian destinasi wisata rintisan pemerintah daerah. Kontribusi ini melengkapi temuan pada kasus-kasus sebanding di Indonesia (Prafitri & Damayanti, 2016; Wibowo dkk., 2022; Saputra & Kamindang, 2024) dengan menunjukkan secara spesifik bagaimana ketiga simptom kegagalan kolaboratif—fragmentasi kewenangan, vakum kepemimpinan, dan hilangnya memori institusional—dapat dipetakan secara sistematis terhadap tahapan siklus hidup destinasi, sehingga menghasilkan kerangka diagnosis yang dapat direplikasi pada kasus destinasi terbengkalai lain di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis keterbengkalaian Telaga Gupit melalui kerangka *collaborative governance* dan Tourism Area Life Cycle. Hasil menunjukkan bahwa keterbengkalaian ini bermuara pada kegagalan tata kelola kolaboratif yang termanifestasi dalam tiga simptom: fragmentasi kewenangan antar-level pemerintahan tanpa akuntabilitas terdokumentasi, vakum kepemimpinan Pokdarwis, dan hilangnya memori institusional akibat pergantian pejabat. Pola ini konsisten dengan temuan pada destinasi berbasis Pokdarwis dan *collaborative governance* lain di Indonesia (Prafitri & Damayanti, 2016; Wibowo dkk., 2022; Saputra & Kamindang, 2024; Junaid, 2023), menunjukkan bahwa kerentanan kelembagaan semacam ini bersifat sistemik, bukan unik pada Telaga Gupit maupun pada sektor pariwisata Lampung secara khusus (Saputra dkk., 2022). Faktor eksogen berupa pandemi COVID-19 dan karakter hidrologis tadah hujan memperparah kerentanan struktural yang telah teridentifikasi sejak tahun-tahun awal operasional.

Dengan kerangka TALC, Telaga Gupit saat ini diposisikan pada fase penurunan (*decline*), namun jalur peremajaan secara teoretis masih terbuka apabila intervensi pada empat dimensi—kelembagaan, ekologis, sosial-ekonomi, dan kebijakan—dilakukan simultan, mengikuti pola revitalisasi yang berhasil pada kasus pembanding seperti Monumen Nasional (Nugraha & Putra, 2023).

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui pepaduan *collaborative governance* dengan TALC pada kasus destinasi wisata rintisan pemerintah daerah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan di Pringsewu maupun daerah lain berkarakteristik serupa. Mengingat keterbatasan metodologis penelitian ini yang bersandar pada data sekunder, penelitian lanjutan yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi langsung dengan Pokdarwis, perangkat pekon, dan dinas terkait sangat dianjurkan untuk memverifikasi dan memperkaya temuan ini.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyediakan dokumentasi dan informasi publik mengenai Telaga Gupit, termasuk media massa lokal dan nasional yang telah meliput perkembangan destinasi ini dari masa ke masa, serta peneliti terdahulu yang telah memberikan dasar pijakan akademik bagi penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 24(1), 5-12.
- Damanik, J., Wijayanti, A., & Nugraha, A. (2018). Perkembangan siklus hidup destinasi pariwisata di Indonesia: Analisis berdasarkan data makro Badan Pusat Statistik, 2002-2012. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 10(1), 1-13.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- Junaid, I. (2023). Tantangan dan strategi pengelolaan desa wisata: Perspektif peserta pelatihan pariwisata. *Journal of Mandalika Review*, 2(2), 1-10.
- Muhamad, Choiriyah, D. A., Oktaviyandari, P. R., & Alzari, S. R. (2026). Transformasi Air Terjun Sempor sebagai destinasi wisata alternatif berbasis masyarakat. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, 4(1), 181-190.
- Nugraha, R., & Putra, C. G. A. (2023). Pengaruh revitalisasi Monumen Nasional sebagai penunjang peningkatan minat berkunjung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 371-380.

- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas kelembagaan dalam pengembangan desa wisata (Studi kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76-86.
- Saputra, M. A., & Kamindang, I. (2024). Kapasitas kelembagaan kelompok sadar wisata dalam pengembangan desa wisata Kampung Merah Putih di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9), 527-540.
- Saputra, P. R., Lendra, I. W., Destrilia, I., & Wahyuni, F. (2022). Pengembangan wisata dan ekonomi kreatif Lampung dalam perspektif *collaborative governance*. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 13(1), 33-48.
- Wibowo, B., Suherlan, H., Hidayah, N., & Nurrochman, M. (2022). Analisis tata kelola kolaboratif desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan: Investigasi empiris dari Ngargoretno-Magelang. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 6(1), 75-84.